

PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI TAHUN 2007-2011

Ni Luh Putu Fitriani¹
A.A.N.B. Dwirandra²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
email: pitri.putu@yahoo.co.id/telp: +62 87 86 23 68 444

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Pelaksanaan otonomi daerah melalui skema desentralisasi fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali ditenggarai tidak sepenuhnya mampu menggali sumber pendapatan daerah yang kedepannya akan menunjang keberhasilan masing-masing daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Sementara, data APBD yang sifatnya absolut tidak cukup memberikan informasi yang memadai tentang kinerja keuangan daerah. Tujuan penelitian ini adalah menilai kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2007-2011 yang diukur melalui perhitungan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Hasil analisis data menunjukkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2007-2011 masuk dalam kategori rendah sekali, rendah dan sedang. Efektivitas keuangan daerah masuk dalam kategori efektif dan sangat efektif. Sementara efisiensi keuangan daerah berada dalam kategori kurang efisien dan tidak efisien. Apabila dilihat dari keserasian belanja pada periode tersebut menunjukkan tidak ada keserasian antara belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap total belanja daerah, serta pertumbuhan pendapatan dan belanja mengalami fluktuasi.

Kata kunci: *rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan*

ABSTRACT

Implementation autonomy through decentralization fiscal scheme district in the province of bali allegedly not fully able to explore regions revenue in the future will support the success of each region in the implementation of regional autonomy. Meanwhile, budget data that are absolutely not enough adequate information about the financial performance area. The purpose of this study was to assess the financial performance of the district in the bali province in 2007-2011. The results indicate financial independence in the category of very low, low and medium. Financial effectiveness in the category of effective area and very effective. While local financial efficiency are in the category of less efficient and inefficient. When viewed from the harmony of expenditure in this period showed no harmony between indirect expenditures and direct expenditures to total public expenditures, and revenue and expenditure growth has fluctuated.

Keywords: *self-sufficiency ratio, the ratio of effectiveness, efficiency ratio, the ratio of harmony, the ratio of growth*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan konsep pembangunan ekonomi berbasis desentralisasi di Indonesia, dimana adanya pemberian kewenangan secara luas bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pembaharuan terhadap sistem pengelolaan daerah dan anggaran daerah. Penerapan otonomi daerah diharapkan agar setiap daerah mampu menggali dan mengembangkan potensi daerah yang dimiliki sehingga mampu memperoleh pendapatan dan membiayai daerahnya yang akan menentukan keberhasilan penerapan kebijakan otonomi daerah tersebut (Sanusi dan Irman, 2012).

Perimbangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemda dapat dikatakan ideal apabila setiap tingkat pemerintahan dapat secara independen mengatur keuangannya untuk membiayai tugas dan wewenang daerahnya masing-masing (Dollery, 2009). Hal ini dapat diwujudkan apabila pemerintahan didasari pada empat elemen yang menjadi pilar utama. Elemen tersebut terdiri dari kejujuran, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas (Mustafa, 2012). Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemda dalam bidang keuangan daerah. Hal ini diperlukan karena keuangan daerah merupakan salah satu unsur yang penting dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah (Lotz, 2005). Akuntabilitas atau pertanggungjawaban Pemda dalam keuangan daerah memiliki dimensi dan cakupan pengaruh yang sangat besar bagi daerah yang bersangkutan. Pertanggungjawaban yang memadai harus mempunyai informasi yang mencerminkan kinerja dari Pemda dan sifat mudah dimengerti, sehingga pertanggungjawaban Pemda yang dilakukan dapat

meningkakan kesejahteraan masyarakat (Puspitasari, 2013). Ciri utama bahwa daerah telah mampu melaksanakan otonomi adalah terletak pada kemampuan dalam mengelola keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat semakin kecil (Yanusa, 2013). Mengenai hal tersebut diharapkan PAD harus menjadi kontribusi terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan Pemda.

Kemampuan mengelola keuangan daerah tercantum dalam laporan APBD yang menggambarkan kemampuan dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan Pemda beserta pembangunannya dengan menggunakan seluruh potensi yang dimiliki (Losa, 2012). Laporan APBD merupakan data absolut yang belum sepenuhnya mampu memberikan informasi yang cukup mengenai kinerja keuangan Pemda dalam mengelola dan membiayai kegiatan masing-masing daerahnya.

Penelitian Dwirandra (2008), menganalisis tentang efektivitas dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2002-2006 dengan melakukan pengukuran terhadap rasio-rasio keuangan. Asak (2010), menggunakan rasio-rasio keuangan untuk menganalisis penilaian kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2006-2008. Erawati (2012), menganalisis kinerja keuangan kawasan Metropolitan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita) pada tahun anggaran 2007- 2008 menggunakan rasio-rasio keuangan.

Penelitian-penelitian sebelumnya hanya meneliti pada satu dan dua daerah atau hanya beberapa daerah serta menilai kinerja keuangan daerah dengan

menggunakan beberapa rasio keuangan. Penelitian ini menilai kinerja keuangan daerah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dengan. Menggunakan rasio-rasio keuangan dan dalam perhitungannya nanti diharapkan dapat memberikan hasil dan informasi yang maksimal mengenai kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2007-2011.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Biro Keuangan Bagian Anggaran Pemerintah Provinsi Bali. Lokasi ini dipilih karena laporan APBD masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali terdapat pada Biro Keuangan Bagian Anggaran Pemerintah Provinsi Bali. Kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2007-2011 menjadi objek dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Perhitungan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan digunakan pada teknik analisis dalam penelitian ini.

- 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, diukur dengan membandingkan pendapatan asli daerah yang diterima Kabupaten/Kota provinsi Bali dengan total penerimaan Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Tabel 1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Abdul Halim, 2007:188

- 2) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Tabel 2
Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Sumber: Mega Pratidina, 2013

- 3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, diukur dengan membandingkan total realisasi pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dengan realisasi belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Tabel 3
Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
> 100	Tidak Efisien
90-100	Kurang Efisien
80-90	Cukup Efisien
60-80	Efisien
< 60	Sangat Efisien

Sumber: Mega Pratidina, 2013

- 4) Rasio Keserasian, diukur dengan membandingkan belanja rutin maupun belanja pembangunan terhadap total belanja daerah.
- 5) Rasio Pertumbuhan, diukur dengan cara mengurangi antara realisasi pendapatan dan belanja daerah periode ini dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah periode sebelumnya selanjutnya dibandingkan dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah periode sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun anggaran 2007-2011 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2011

Kabupaten/Kota	Rasio Kemandirian (%)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Buleleng	5,96	7,21	8,30	10,20	10,35
Jembrana	4,30	4,67	5,00	10,20	7,27
Tabanan	8,87	13,17	13,72	14,89	15,91
Badung	52,88	60,61	60,54	70,59	75,98
Gianyar	13,67	14,86	15,79	19,90	23,57
Bangli	2,99	2,95	3,99	3,42	4,23
Klungkung	6,54	6,86	6,91	7,01	8,10
Karangasem	7,00	7,03	7,68	9,05	15,79
Denpasar	22,82	25,66	26,20	28,82	36,95

Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat dilihat tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2007-2011 berada pada pola instruktif yaitu sama-sama pada interval 0-25 persen yang terjadi pada tujuh kabupaten yaitu Buleleng, Jembrana, Tabanan, Gianyar, Bangli, Klungkung dan Karangasem dimana pada periode tersebut peranan Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah atau kemampuan keuangan daerahnya rendah sekali. Sedangkan Kabupaten Badung pada tahun 2007-2010 berada pada pola partisipatif yaitu pada interval 50-75 persen dimana pada periode tersebut peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, bahwa tingkat kemandirian yang dimiliki oleh daerah mendekati mampu untuk melaksanakan

urusan otonomi daerah. Namun pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Badung mampu meningkatkan pola hubungan menjadi delegatif yaitu berada pada interval 75-100 persen dimana pada tahun 2011 campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Pada kota Denpasar tahun 2008-2011 mampu meningkatkan pola hubungan dari insruktif pada tahun sebelumnya menjadi konsultatif yaitu berada pada interval 25-50 persen dimana pada periode tersebut campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu untuk melaksanakan otonomi daerah. Sehingga pada periode 2007-2011 tingkat kemandirian keuangan daerah yang paling baik pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali adalah Kabupaten Badung yang mempunyai pola hubungan delegatif.

Tabel 5.
Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2011

Kabupaten/Kota	Rasio Efektivitas (%)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Buleleng	94,87	118,48	110,90	112,63	106,97
Jembrana	108,13	108,77	112,38	104,74	114,02
Tabanan	104,75	171,12	109,37	108,37	107,40
Badung	122,11	122,42	112,58	104,52	121,72
Gianyar	102,72	117,13	105,32	116,69	119,58
Bangli	115,40	120,53	119,70	94,54	104,38
Klungkung	126,10	134,22	106,87	101,10	117,31
Karangasem	111,43	114,44	112,66	113,61	106,56
Denpasar	110,82	118,16	121,72	122,29	130,07

Sumber: data sekunder diolah

Pada Tabel 5 di atas dapat dilihat rasio efektivitas keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2007-2011 sangat efektif karena berada pada interval > 100 persen. Walaupun pada tahun 2007, rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Buleleng (94,87%) berada pada interval

90-100 persen sehingga masuk kriteria efektif dan pada tahun 2010 rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Bangli (94,54%) berada pada interval 90-100 persen sehingga masuk kriteria efektif, namun pada tahun berikutnya kembali mampu meningkatkan efektivitas keuangan daerahnya. Dilihat secara keseluruhan efektivitas keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2007-2011 sudah baik karena mampu merealisasikan penerimaan PAD melebihi target penerimaan PAD yang telah ditetapkan.

Tabel 6.
Perhitungan Tingkat Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2011

Kabupaten/Kota	Rasio Efisiensi (%)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Buleleng	97,57	102,20	100,00	101,77	101,60
Jembrana	97,53	102,17	73,59	98,52	103,92
Tabanan	100,93	102,86	97,21	101,44	100,44
Badung	100,48	116,64	98,25	105,16	128,06
Gianyar	98,13	103,62	100,65	102,31	106,15
Bangli	96,61	174,56	1065,04	101,64	94,52
Klungkung	104,14	104,59	95,30	101,15	101,66
Karangasem	99,62	101,51	94,56	105,34	102,40
Denpasar	106,20	104,19	103,99	96,29	104,54

Sumber: data sekunder diolah

Pada Tabel 6 di atas dapat dilihat rasio efisiensi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2007-2011 secara garis besar termasuk dalam kategori kurang efisiensi karena sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali berada pada interval 90-100 persen walaupun setiap Kabupaten/Kota di setiap tahunnya, rasio efisiensi keungan daerahnya berada dalam kategori tidak efisien yaitu berada pada interval > 100 persen dan hanya pada tahun 2009 Kabupaten Jembrana rasio efisiensi mampu masuk dalam kategori efisien.

Tabel 7.
Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2011

Kabupaten/Kota	Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung (%)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Buleleng	59,27	64,44	67,84	76,54	70,91
Jembrana	53,16	60,36	71,85	39,20	65,49
Tabanan	67,38	71,00	72,31	75,69	72,43
Badung	50,53	55,42	53,82	68,47	68,09
Gianyar	60,37	62,45	64,31	71,05	69,05
Bangli	47,87	57,59	34,36	71,11	66,97
Klungkung	47,72	63,27	60,66	73,38	72,95
Karangasem	56,10	56,21	61,55	76,64	69,00
Denpasar	50,77	58,91	59,59	64,53	61,86

Sumber: data sekunder diolah

Tabel 8.
Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Langsung Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2011

Kabupaten/Kota	Rasio Keserasian Belanja Langsung (%)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Buleleng	40,73	35,56	32,16	23,46	29,09
Jembrana	46,84	39,64	28,15	60,80	34,51
Tabanan	32,62	29,00	27,69	24,31	27,57
Badung	49,47	44,58	46,18	31,53	31,91
Gianyar	39,63	37,55	35,69	28,95	30,95
Bangli	52,13	42,41	65,64	28,89	33,03
Klungkung	52,28	36,73	39,34	26,62	27,05
Karangasem	43,90	43,79	38,45	23,36	31,00
Denpasar	49,23	41,09	40,41	35,47	38,14

Sumber: data sekunder diolah

Dilihat pada Tabel 7 dapat diketahui rasio keserasian belanja tidak langsung Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2007-2011 keserasiannya kurang baik karena dari tahun 2007-2011 persentase semakin meningkat dari tahun ke tahun meskipun ada satu Kabupaten/Kota di setiap tahunnya mampu menurunkan persentase dari tahun sebelumnya tetapi kembali meningkat pada tahun berikutnya. Rasio keserasian belanja langsung Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2007-2011 dalam Tabel 8, dari tahun ke tahun semakin menurun meskipun

ada satu Kabupaten/Kota di setiap tahunnya mampu meningkatkan persentase keserasian belanja langsung dari tahun sebelumnya tetapi kembali menurun pada tahun berikutnya. Namun, dalam periode tersebut hasil perbandingan rasio keserasian belanja tidak langsung maupun belanja langsung Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang baik terjadi pada Kabupaten Bangli.

Tabel 9.
Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2011

Kabupaten/Kota	Rasio Pertumbuhan PAD (%)			
	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011
Buleleng	37,92	20,55	36,98	25,53
Jembrana	25,09	9,84	47,40	20,21
Tabanan	83,95	6,94	25,06	20,70
Badung	52,37	11,89	15,18	43,62
Gianyar	29,01	16,11	36,45	36,49
Bangli	12,85	28,81	(0,30)	41,29
Klungkung	18,11	1,85	5,97	30,02
Karangasem	27,89	11,25	31,05	106,64
Denpasar	28,08	22,08	21,07	63,14

Sumber: data sekunder diolah

Tabel 10.
Perhitungan Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2011

Kabupaten/Kota	Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan (%)			
	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011
Buleleng	14,16	4,59	11,50	23,74
Jembrana	15,23	2,63	4,73	16,21
Tabanan	68,08	2,66	15,22	12,92
Badung	32,93	12,03	(1,23)	33,43
Gianyar	18,64	9,30	8,25	15,28
Bangli	14,36	(4,74)	16,54	14,26
Klungkung	12,55	1,23	4,42	12,48
Karangasem	27,49	1,75	11,28	18,39
Denpasar	13,90	19,56	10,04	27,26

Sumber: data sekunder diolah

Tabel 11.
Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2011

Kabupaten/Kota	Rasio Pertumbuhan Belanja Aparatur Daerah (%)			
	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011
Buleleng	18,50	13,84	22,17	14,83
Jembrana	24,91	65,11	(21,76)	3,14
Tabanan	28,11	10,62	15,56	9,14
Badung	36,86	29,17	17,40	8,94
Gianyar	16,21	15,89	17,65	7,98
Bangli	32,20	(84,39)	773,57	15,02
Klungkung	48,59	6,52	19,02	11,25
Karangasem	25,34	19,60	24,39	9,64
Denpasar	34,71	21,16	28,70	12,38

Sumber: data sekunder diolah

Tabel 12.
Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Langsung
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2011

Kabupaten/Kota	Rasio Pertumbuhan Belanja Pelayanan Publik (%)			
	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011
Buleleng	(4,84)	(2,18)	(21,00)	53,66
Jembrana	(6,93)	(1,47)	(14,28)	26,59
Tabanan	8,10	3,70	(3,06)	29,35
Badung	12,42	37,78	(37,00)	10,91
Gianyar	6,46	6,93	(13,62)	18,80
Bangli	-	-	-	39,66
Klungkung	(21,27)	18,99	(33,44)	13,75
Karangasem	24,81	(4,09)	(39,33)	61,66
Denpasar	(3,09)	17,82	4,31	26,03

Sumber: data sekunder diolah

Dilihat pada Tabel 9 rasio pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2007-2011 yang pertumbuhannya paling baik adalah Kabupaten Karangasem. Pada Tabel 10 rasio pertumbuhan total pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang pertumbuhannya paling baik adalah Kabupaten Tabanan. Pada Tabel 11 rasio pertumbuhan belanja tidak langsung Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang paling baik adalah Kabupaten Gianyar. Pada Tabel 12 rasio pertumbuhan belanja langsung Kabupaten/Kota di Provinsi

Bali yang paling baik adalah Kota Denpasar. Terjadinya pertumbuhan positif maupun negatif disebabkan oleh penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja tidak menentu setiap tahunnya serta potensi dan pelayanan daerah yang dimiliki oleh masing-masing daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali berbeda-beda.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2007-2011 adalah sebagai berikut.

- 1) Kemandirian keuangan daerah otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2007-2011 masuk dalam kategori kemandirian yang rendah sekali, rendah dan sedang. Hanya Kabupaten Badung pada tahun 2011 berada dalam kategori kemandirian yang tinggi. Namun, kemandirian keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Bali secara garis besar berada pada interval 0-25 persen.
- 2) Efektivitas keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun anggaran 2007-2011 masuk dalam kategori efektif dan sangat efektif serta tidak ada yang cukup efektif, kurang efektif dan tidak efektif atau dengan rasio efektivitas berkisar dari 90,01 persen sampai dengan di atas 100 persen. Namun perlu dicurigai bahwa apakah dalam instansi masing-masing Kabupaten/Kota telah mengajukan perbedaan jumlah anggaran dengan estimasi yang terbaik dari organisasi. Hal ini dilakukan dengan cara menyajikan anggaran yang tingkat kesulitannya lebih rendah agar

mudah dicapai sehingga mendapatkan insentif dalam pelaksanaannya yang telah mampu mencapai target.

- 3) Efisiensi keuangan daerah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali berada dalam kategori efisien, kurang efisien dan tidak efisien. Hal ini berarti seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali, persentase efisiensi berada pada interval di atas 60,01 persen dan di atas 100 persen. Pada tahun 2009 efisiensi keuangan daerah Kabupaten Jembrana masuk dalam kategori efisien (berada pada interval 60% - 80%). Kemungkinan hal ini dapat disebabkan oleh dilakukannya moratorium atau pengangkatan pegawai sehingga pengeluaran keuangan daerah dalam pembayaran terhadap pegawai baru yang masuk dalam item belanja daerah menjadi lebih besar. Dalam hal tersebut tingkat efisiensi keuangan daerah menjadi kurang baik atau masih fluktuatif di setiap tahunnya.
- 4) Dilihat dari keserasian belanja daerah pada periode tersebut menunjukkan tidak ada keserasian antara belanja tidak langsung maupun belanja langsung terhadap total belanja daerah. Keserasian belanja tidak langsung Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2007-2011 secara garis besar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sedangkan keserasian belanja langsung secara garis besar dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dana pada anggaran daerah dialokasikan pada belanja rutin atau belanja tidak langsung, hal ini membuktikan bahwa kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali terhadap pelayanan publik yang nantinya akan dinikmati

oleh masyarakat. Namun, melihat dari hal tersebut masing-masing Pemda berupaya dalam menurunkan persentase belanja tidak langsung dan meningkatkan belanja pelayanan langsung sehingga pelayanan yang diberikan publik dapat lebih dinikmati oleh masyarakat.

- 5) Pertumbuhan pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2007-2011 mengalami fluktuasi atau pertumbuhannya tidak stabil. Hasil pertumbuhan positif maupun negatif disebabkan oleh penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja tidak menentu setiap tahunnya serta potensi dan pelayanan daerah yg dimiliki oleh masing-masing daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali berbeda-beda.

Berdasarkan simpulan tersebut, saran-saran kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sebagai berikut.

- 1) Untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Bali lebih meningkatkan kemampuan dalam menggali sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan PAD, karena kemandirian suatu daerah ditentukan oleh sejauh mana kontribusi pendapatan daerah terhadap total penerimaan sebagai sumber dalam pembangunan. Upaya yang dapat dilakukan adalah Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dalam menyusun dan merealisasikan pendapatan dan belanja daerah perlu memperhatikan arah perkembangan pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah agar menunjukkan kondisi yang lebih baik.

- 2) Tingkat efektivitas PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang sudah efektif bahkan sangat efektif perlu dipertahankan dan pada tingkat yang efektivitasnya masih efektif ditingkatkan lagi sehingga efektivitas keuangan daerahnya menjadi sangat efektif. Namun perlu diperhatikan dalam pengajuan estimasi anggaran yang dilakukan oleh pihak bawahan masing-masing instansi pemerintahan apakah melakukan kesenjangan terhadap anggaran sehingga mempermudah dalam pencapaian target serta mendapatkan insentif serta peran agen dalam pemerintahan dalam pelaporan anggaran perlu lebih diperhatikan.
- 3) Tingkat efisisensi keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang kurang efisien bahkan tidak efisien perlu diperbaiki dengan cara lebih cermat menghitung berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima serta memperhatikan jumlah pengangkatan pegawai dalam setiap periode sehingga tingkat efisiensi keuangan daerah dapat lebih efisien.
- 4) Tingkat keserasian belanja tidak langsung dari tahun ke tahun diusahakan agar persentase semakin rendah dan tingkat keserasian belanja langsung, diusahakan agar persentase meningkat karena akan menunjukkan dalam memberikan pelayanan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan masyarakat.
- 5) Meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali perlu lebih memaksimalkan kinerjanya sehingga mampu menggali sumber-sumber pendapatan baru, misalnya

pemungutan hasil retribusi daerah dalam pemungutan uang parkir kendaraan bermotor dan kendaraan roda empat. Selain hal tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan upaya agar mendatangkan lebih banyak investor ke daerah yang akan meningkatkan hasil retribusi daerah misalnya dalam uang muka sewa tanah dan izin bangunan, serta memaksimalkan retribusi pasar-pasar daerah.

REFERENSI

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Keuangan daerah*. Edisi ke 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Asak, P. Rani Adnyani. 2010. Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Sebagai Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Kota Denpasar dan kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2006-2008. *Skripsi* Fakultas ekonomi Universitas Udayana.
- Dollery, Brian. 2009. Local Government Reform and Local Government Finance. *Journal of New England University*.
- Dwirandra, A.A.N.B. 2008. Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2002-2006. *Jurnal* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Erawati, Adi. 2012. Analisis Kinerja Kawasan Metropolitan Sarbagita. *Jurnal* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Losa, Al Fino. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat. <http://repositori.unri.ac.id>. Diunduh 7 September 2013.
- Lotz, Jorgen. 2005. Accountability and Control in the Financing of Local Government in Denmark. <http://www.oecd.org/denmark/43480915.pdf>. Diunduh 7 September 2013.
- Mega Pratidina. 2013. Kinerja Keuangan Pemerintah Serta Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Blitar Tahun

Anggaran 2008-2010. *Jurnal* fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.

Mustafa, Abbas K.A. 2012. Assessing Performance and Intervention of Microfinance Institution: A Case Study In Sudan. *Journal Faculty of Management and Human Resource Development*, Malaysia.

Niek, Schoeman. 2011. Fiscal Performance and Sustainability of Local Government in South Africa. *Journal of Pretoria University*, South Africa.

Nur B. Abu B, Zakiah S and Muslim H. Sani M. 2011. Enhancing Malaysian Public Sector Transparency and accountability: Lessons and Issues. *Journal of Faculty Economic International Islamic University*, Malaysia.

Oluran, Kinse. 2012. Analysis of the Effectiveness of capital Expenditure Budgeting in Local Government. *Journal of Adekunle Ajasin University*, Nigeria.

Puspitasari, Ayu Febrianti. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011. *Jurnal* Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.

Sanusi Fattah dan Irman. 2012. Analisis Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Pada Era Otonomi Daerah. *Jurnal* fakultas Ekonomi Universitas Hassanudin, Makasar.

Yanusa, Abu bakar Idu. 2013. Assessment of Financial Performance of Ankpa Local Government Council of Kogi State. *Journal of Kogi State University*, Nigeria.